LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN FEBUARI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 10 Maret 2023

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang/Pejabat eselon III
3. Kepala Sub Bagian/Eselon IV dan Pejabat Fungsional
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Pelaksana di masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 14,38 %

b. Keuangan = 2.759.346.883 (11,81%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.524.000			0		
1	Rapat Koordinasi Perencanaan Program Kab/Kota	24.635.000	100	30	0	(70)	Rapat persiapan dan koordinasi
2	Konsultasi Keterpaduan Pusat dan Daerah	16.889.000	10	0	0	(10)	Masih dalam proses persiapan koordinasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.800.000			5.347.500		
1	Konsultasi dan koordinasi	42.800.000	14	12,49	5.347.500	(1,51)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000			31.564.900		
1	Persiapan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11.790.000	38,93	8,48	1.000.000	(30,45)	Sesuai dengan kebutuhan pendampingan korban kekerasan
2	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	234.710.000	15,49	13,02	30.564.900	(2,47)	
3	Pelaporan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	100	0	0	(100)	Sesuai dengan kebutuhan pendampingan korban kekerasan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	108.750.000			5.342.000		

1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	108.750.000	14,25	4,91	5.342.000	(9,34)	Sesuai dengan kebutuhan pendampingan korban kekerasan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	35.165.000			29.843.000		
1	Rapat Persiapan Kegiatan Pelatihan Fasilitator SAPA	1.946.000	100	99,40	1.936.000	(0,60)	
2	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Fasilitator SAPA	33.219.000	100	84,01	27.907.000	(15,99)	Pengembalian honorarium fasilitator dan biaya tiket fasilitator pusat
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	66.560.000			6.500.000		
1	Sosialisasi TPK2D Kabupaten/Kota	66.560.000	10,52	9,77	6.500.000	(0,75)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	6.590.000			500.000		
1	Persiapan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	5.090.000	100	50	500.000	(50)	Sesuai dengan kebutuhan pendampingan korban kekerasan

	Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						
2	Pelaporan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	1.500.000	100	0	0	(100)	Sesuai kebutuhan pendampingan korban kekerasan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	64.320.000			0		
1	Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB Aisyiah	64.320.000	0,77	0	0	(0,77)	
	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	725.000.000			33.567.960		
1	Safari Pelayanan KB MKJP	725.000.000	5,69	4,63	33.567.960	(1,06)	SPJ dan kelengkapan administrasi dari Kabupaten/Kota yang masih perlu diperbaiki sehingga belum bisa di SPJ kan pada rekening Uang Harian Peserta Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia	257.990.000			40.730.874		

	Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	107.990.000	34,82	22,85	25.275.874	(11,97)	menyesuaikan jadwal Forum Puspa,
2	PENGUATAN PERAN SERTA BKOW PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	150.000.000	11,72	10,30	15.455.000	(1,42)	

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	16	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Terdapat kegiatan yang mengalami deviasi negatif yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terdapat 2 SSK yang mengalami deaviasi negatif yaitu Rapat Koordinasi Perencanaan Program Kab/Kota dan Konsultasi Keterpaduan Pusat dan Daerah
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdapat 1 SSK yang mengalami deaviasi negatif yaitu Konsultasi dan koordinasi
3. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 SSK yang mengalami deaviasi negatif yaitu Persiapan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan Pelaporan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Rapat Persiapan Kegiatan Pelatihan Fasilitator SAPA dan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Fasilitator SAPA;
6. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Sosialisasi TPK2D Kabupaten/Kota;
7. Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Persiapan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Pelaporan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi;
8. Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB Aisyiah

9. Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Safari Pelayanan KB MKJP
10. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Penguatan Peran Serta Bkow Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan.
11. Penyusunan dokumen perencanaan masih dalam tahap koordinasi
12. Kegiatan penyediaan layanan korban kekerasan disesuaikan dengan kebutuhan pendampingan korban kekerasan
13. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan menyesuaikan jadwal Forum Puspa
14. Evaluasi KLA sedang dalam tahapan Evaluasi Mandiri oleh Kabupaten/Kota (sampai dengan 23 Maret 2023) (SEKSI PHA)
15. Terdapat sejumlah perubahan dalam pertanyaan evaluasi KLA tahun 2023 (SEKSI PHA)
16. Terdapat Kabupaten yang mengalami penurunan peringkat pada evaluasi KLA Tahun 2022 lalu (SEKSI PHA)
17. PPRG anggaran 2024 belum disusun menunggu pengesahan Anggaran 2024 (SEKSI KHP)
18. Pelaksanaan Sosialisasi mengikuti jadwal DPRD dan KPU, sehingga baru terlaksana 3 titik lokasi di bulan Februari (SEKSI KHP)
19. Belum semua Kab/Kota menyediakan layanan khusus bagi keluarga melalui Puspaga (SEKSI PHA)
20. Proses standarisasi Puspaga dilakukan hanya oleh Kementerian PPPA saja (SEKSI PHA)
21. Daerah mengalami kesulitan dalam mengajukan standarisasi Puspaga (SEKSI PHA)

Upaya

1. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD masih dalam proses persiapan koordinasi
2. Penyediaan layanan sesuai dengan kebutuhan pendampingan korban kekerasan (SPT)
3. Menginformasikan kepada Kabupaten/Kota untuk melengkapi administrasi dan SPJ uang harian peserta pada bulan Maret 2023 terkait kegiatan Safari Pelayanan KB (SEKSI KB)
4. Menyesuaikan jadwal Forum Puspa akan dilaksanakan bulan Maret (SEKSI PARMAS)
5. Melakukan rapat koordinasi pengembangan KLA dengan seluruh kab/kota di Jateng dalam rangka penyamaan persepsi atas evaluasi KLA th 2023 (SEKSI PHA)
6. Menyusun rancangan tim pembinaan dan verifikator administrasi yang akan melakukan penilaian/verifikasi secara administrasi (SEKSI PHA)
7. Melakukan pendampingan yang diperlukan kepada kab/kota dalam proses evaluasi KLA 2023 (SEKSI PHA)
8. Dilaksanakan menjelang APE (SEKSI KHP)
9. Peningkatan SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan terkait PPRG agar dapat mengadvokasi dan sosialisasi kepada OPD Kabupaten dan OPD Provinsi terkait PPRG setelah Workshop (SEKSI KHP)
10. Sosialisasi dan Advokasi lanjutan kepada OPD Provinsi dan Kab/Kota terkait PPRG (SEKSI KHP)
11. Sosialisasi kembali dilaksanakan di bulan Maret (SEKSI KHP)
12. Sosialisasi dan advokasi pembentukan Puspaga di daerah (SEKSI PHA)
13. Pendampigan proses standarisasi Puspaga bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki layanan secara komprehensif (SEKSI PHA)

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi dilaksanakan bulan Maret (SEKSI KHP)
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi (SEKSI KHP)
3. Sosialisasi dan advokasi pembentukan Puspaga di daerah (SEKSI PHA)
4. Evaluasi KLA 2023 (SEKSI PHA)
5. Forum OPD Renstra dan Renja (Sub Bagian Program)

V. PENUTUP

4. PENUTUP

Stressing Pengendalian :

1. Para Kabid/Kasubag/Sub Koordinator pada masing-masing bidang/seksi selalu mengontrol dan memperhatikan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta realisasinya;
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Februari 2023, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Jumat, 10 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001